

KURIKULUM
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2023

A. Identitas Program Studi

1	Perguruan Tinggi	Universitas Mulawarman
2	Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3	Program Studi	PPKn
4	Kode Program Studi ????Lihat lampiran Ketentuan Pokok
5	Strata	S1
8	Alamat	Jalan Banggeris, Kampus FKIP Banggeris, Kel. Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang
9	Nomor Telpon
10	Alamat e-mail	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan @fkip.unmul.ac.id
11	Website	https://ppkn.fkip.unmul.ac.id/
12	Tahun dan Izin/SK Pendirian serta SK Perpanjangan terakhir.	102/DIKTI/Kep/1984
13	Tahun dan Nomor SK Akreditasi BAN PT dan atau LAM (SK terakhir)	BAN-PT No. 2864/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018,
14	Tahun dan SK Akreditasi/Sertifikasi Internasional	2018

B. Identitas Ketua Program Studi

1	Nama	Dr. Jawatir Pardosi.,M.Si.
2	Jabatan	Koordinator Program Studi
3	No. SK Penugasan	3336/UN17.HK.02.03/2023
4	Tanggal Mulai Penugasan	31 Oktober 2023
5	Tanggal Selesai Penugasan	31 Oktober 2026
6	Nomor HP/WA	081347266319

C. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*

- Menjelaskan hasil evaluasi dan tracer Study antara 800 – 1000 kata.
- Kotak dihapus

Kurikulum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) senantiasa dikembangkan berdasarkan lokakarya yang dihadiri oleh pimpinan fakultas, pengelola program studi, dosen program studi, tenaga kependidikan program studi, perwakilan mahasiswa, perwakilan alumni, perwakilan pengguna lulusan, dan perwakilan pengurus asosiasi profesional, yaitu Asosiasi Program Studi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia (APMAPI). Setelah digunakan selama tiga tahun, dan mempertimbangkan perkembangan serta perubahan dunia

pendidikan, dirasa perlu adanya evaluasi berdasarkan yang terjadi di lapangan, yang meliputi hal-hal berikut:

Pertama, untuk menyelesaikan tesis yang merupakan tugas akhir, mahasiswa memerlukan penguatan aspek-aspek tertentu, terutama kemampuan meneliti (khususnya pengumpulan dan analisis data), kemampuan membaca referensi (khususnya artikel hasil penelitian), dan kemampuan menulis akademik (khususnya menganalisis, meringkas, memparafrase, dan mensintesis). Kedua, untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap substansi konseptual teoretis, diperlukan pemetaan kompetensi untuk setiap mata kuliah, dalam bentuk (paling tidak) deskripsi mata kuliah, daftar topik yang akan diberikan kepada mahasiswa, referensi yang digunakan. Ketiga, agar butir pertama dan kedua tepat sasaran, diperlukan strategi perkuliahan yang praktis, yang menyeimbangkan aspek teoretis dan praktis. Dua metode mengajar yang bisa digunakan adalah problem-based learning dan case study.

D. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

LANDASAN FILOSOFIS

Pendirian filosofis Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mendasari dan memandu pengambilan keputusan, penetapan tujuan, dan keseluruhan struktur organisasi.

Realisme: berfokus pada aspek realitas yang objektif dan dapat diamati. Landasan ini mengutamakan keterampilan praktis, dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan keselarasan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.

Pragmatisme: berkaitan dengan hasil praktis dan penerapan pengetahuan. Landasan pragmatis akan menekankan pengalaman pendidikan praktis dan langsung serta fokus pada mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia nyata.

Eksistensialisme: menekankan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Landasan eksistensial ini memungkinkan PS-PPKn untuk berfokus pada pembelajaran yang dipersonalisasi, penemuan diri, dan pemberdayaan mahasiswa untuk membentuk jalur pendidikan mereka sendiri sebagai pendidik, konsultan, parlemen dana atau di birokrasi pemerintahan.

Progresivisme: menghargai pembelajaran berdasarkan pengalaman, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. Landasan progresif di PS-PPKn akan mendorong pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, pembelajaran berbasis proyek, dan penekanan pada pengembangan keterampilan untuk masa depan.

Konstruktivisme: menekankan pembelajaran aktif, keterlibatan mahasiswa, dan konstruksi pengetahuan oleh mahasiswa. Landasan konstruktivis di PS-PPKn akan melibatkan penciptaan lingkungan yang mendukung pembelajaran berbasis inkuiri, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis.

Esensialisme: menganjurkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan inti yang harus diperoleh semua siswa. Pada PS-PPKn, sikap esensial akan fokus pada kurikulum standar, penekanan kuat pada mata pelajaran akademik, dan pendekatan terstruktur dan berpusat pada guru.

LANDASAN SOSIOLOGIS

Pembentukan Kepribadian Warga Negara: PS-PPKn didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pembentukan kepribadian warga negara yang

memiliki kesadaran akan identitas nasional, nilai-nilai Pancasila, dan tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa.

Kontribusi pada Pembangunan Sosial: melalui PS-PPKn diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial. Pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran sosial, etika, dan tanggung jawab diharapkan dapat membawa dampak positif pada masyarakat.

Mewujudkan Keharmonisan Sosial: Landasan sosiologis PS-PPKn mencakup pemahaman bahwa keharmonisan sosial merupakan pondasi bagi stabilitas dan kemajuan suatu masyarakat. Melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat tercipta kehidupan sosial yang lebih harmonis dan adil.

Mendorong Partisipasi dan Kepedulian Warga Negara: PS-PPKn berusaha mendorong partisipasi aktif dan rasa peduli warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Melibatkan pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara serta motivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Menjaga keberagaman dan Persatuan: Landasan sosiologis PS-PPKn mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila, program studi ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dalam keberagaman.

Mendorong Pemahaman Tentang HAM: PS-PPKn memberikan landasan sosiologis pada pemahaman hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hak dan keadilan bagi semua warga negara.

Menyelaraskan Pendidikan dengan Tantangan Sosial Kontemporer: PS-PPKn didirikan untuk menyelaraskan pendidikan dengan tantangan sosial kontemporer. Dengan memahami konteks sosial yang terus berkembang, program studi ini dapat memberikan kontribusi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengembangan karakter dan Etika Sosial: Landasan sosialisasi PS-PPKn mencakup pengembangan karakter dan etika sosial. Pembentukan individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap kebutuhan sosial menjadi fokus utama

LANDASAN PSIKOLOGIS

Perkembangan Kognitif dan Moral: PS-PPKn didirikan berdasarkan pemahaman tentang perkembangan kognitif dan moral peserta didik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat memberikan wadah untuk pengembangan pemikiran kritis, kapasitas pemahaman moral, dan kemampuan pengambilan keputusan etis.

Identitas dan Kepribadian Bangsa: Melalui landasan psikologis, PS-PPKn memperhitungkan pentingnya pembentukan identitas dan kepribadian warga negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu peserta didik mengembangkan identitas kewarganegaraan mereka.

Pemahaman Psikologi Sosial: Landasan psikologis juga dapat mencakup pemahaman psikologi sosial, yaitu bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat. Program studi ini dapat dirancang untuk memahami dinamika psikologis kelompok dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar interaksi sosial yang positif.

Motivasi dan Keterlibatan: PS-PPKn mempertimbangkan aspek-aspek motivasi dan keterlibatan peserta didik. Melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam

kehidupan sosial dan memahami dampak positif dari partisipasi mereka.

Psikologi Pembelajaran: Landasan psikologis juga dapat mencakup prinsip-prinsip psikologi pembelajaran. Program studi ini dapat dirancang dengan mempertimbangkan gaya belajar individu, penggunaan strategi pembelajaran yang efektif, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis.

Pengembangan Empati dan Toleransi: Melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program studi ini dapat mengintegrasikan aspek-aspek psikologis yang mendukung pengembangan empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini mencakup pemahaman perbedaan, kemampuan berempati terhadap pengalaman orang lain, dan pengembangan sikap terbuka.

Pembangunan Karakter dan Kepemimpinan: Landasan psikologis program studi dapat mencakup pembangunan karakter dan kepemimpinan. Melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta didik dapat mengembangkan kualitas kepemimpinan yang positif dan karakter yang kuat dalam konteks kewarganegaraan. Psikologi belajar mahasiswa mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Ada tiga jenis teori belajar yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik.

LANDASAN HISTORIS

Konteks Sejarah Proklamasi Kemerdekaan: PS-PPKn didirikan sebagai tanggapan terhadap semangat dan nilai-nilai yang muncul selama periode perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis bagi bangsa yang baru merdeka.

Reformasi Pendidikan: PS-PPKn dipengaruhi oleh perubahan atau reformasi dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan-perubahan ini mungkin memunculkan kebutuhan akan program studi yang fokus pada pembentukan karakter, kewarganegaraan, dan nilai-nilai moral.

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan: Pada suatu periode tertentu, masyarakat mungkin menyadari pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk generasi yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Konteks Pendidikan Moral dan Etika: PS-PPKn hadir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan peningkatan pendidikan moral dan etika di sekolah. Landasan historis ini bisa melibatkan perubahan pandangan masyarakat terhadap perlunya pendidikan yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai moral dan etika kewarganegaraan.

Dampak Perubahan Sosial-Politik: Perubahan signifikan dalam konteks sosial-politik, seperti transisi dari rezim politik tertentu atau perubahan paradigma dalam pemahaman nasionalisme, dapat memotivasi pendirian PS-PPKn untuk mengakomodasi kebutuhan baru dalam membentuk identitas dan karakter warga negara.

Globalisasi dan Tantangan Multikultural: Landasan historis pendirian PS-PPKn sebagai tantangan globalisasi dan pertumbuhan masyarakat multikultural. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dirancang untuk menghadapi tantangan ini dan mempersiapkan warga negara yang dapat berinteraksi secara positif dalam konteks global.

Pentingnya Pendidikan Demokrasi: PS-PPKn diinisiasi karena pemahaman pentingnya pendidikan demokrasi dan kebutuhan untuk membentuk masyarakat

yang aktif dalam proses demokratisasi.

LANDASAN YURIDIS

1. UU No. 20 tahun 2003 pada pasal 37 ayat 1, yang dimana peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air seperti contoh : Tidak merusak fasilitas umum.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - Pasal 35 Ayat 5 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengajaran, penelitian.

E. Visi, Misi, Tujuan

1. VISI

Mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan transformasi Budaya Menuju Peradaban Baru Indonesia Dari Ibu Kota Nusantara Tahun 2045.

2. MISI

- Menyelenggarakan pembelajaran bermutu dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi terkini yang menghasilkan calon guru yang mampu Mengembangkan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.

- Menyelenggarakan riset dan publikasi karya ilmiah dalam jurnal dan atau prosiding bereputasi nasional dan atau internasional fokus pada pengembangan dan pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset guna memberikan solusi terhadap permasalahan berkaitan dengan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.
- Menyelenggarakan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan instansi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan profesional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.

3. TUJUAN

- Untuk menyelenggarakan pembelajaran bermutu dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi terkini yang menghasilkan calon guru yang mampu Mengembangkan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.
- Untuk menyelenggarakan riset dan publikasi karya ilmiah dalam jurnal dan atau prosiding bereputasi nasional dan atau internasional fokus pada pengembangan dan pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.
- Untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset guna memberikan solusi terhadap permasalahan berkaitan dengan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.
- Untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan instansi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan profesional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.

4. STRATEGI

- a. Terwujudnya pembelajaran bermutu: melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi terkini yang menghasilkan calon guru yang mampu Mengembangkan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara. (Jangka Pendek)
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi terkini, metode pembelajaran yang bervariasi, meningkatnya indeks prestasi mahasiswa, meningkatnya tertib administrasi dosen. Proses pembelajaran dalam kampus dan luar kampus, seperti program MBKM untuk mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara; (Jangka Pendek)
- c. Peningkatan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan Prodi PPKn. Dapat dilihat dari jumlah dosen yang bersertifikat pendidik, jabatan fungsional akademik dosen, jenjang akademik dosen. (Jangka Pendek).

d. Peningkatan daya saing mahasiswa Dapat dilihat dari capaian indeks prestasi kumulatif mahasiswa di atas 3.00. Capaian kejuaraan mahasiswa, keberhasilan lulusan/alumni dalam lapangan pekerjaan. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan membekali mahasiswa teori dan praktik pembelajaran yang dilaksanakan di kampus dan dilanjutkan dengan praktek lapangan. Mengembangkan *soft skills* mahasiswa melalui pendampingan kegiatan-kegiatan kemahasiswa seperti klinik debat, latihan dasar kepemimpinan, latihan beracara di pengadilan dan latihan *public speaking*. (Jangka Pendek)

e. Terselenggaranya riset dan publikasi karya ilmiah dalam jurnal dan atau prosiding bereputasi nasional dan atau internasional yang berfokus pada pengembangan dan pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dosen. Dapat dilihat dari jumlah riset dan jumlah publikasi ilmiah baik di seminar nasional maupun internasional. Hibah riset dan mandiri riset dosen. Partisipasi dosen dalam *workshop-workshop* riset. (Jangka Menengah)
2. Peningkatan kapasitas dosen dalam menulis jurnal ilmiah. Dapat dilihat dari jumlah artikel ilmiah dosen. Semua hasil riset dosen dapat dipublikasikan dalam ke jurnal bereputasi nasional; internasional, dan atau seminar/prosiding. (Jangka Menengah)
3. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Dapat diketahui dari semakin banyak mahasiswa yang terlibat aktif dalam riset dosen dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun oleh prodi PPKn. (Jangka Menengah).
4. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset guna memberikan solusi terhadap permasalahan berkaitan dengan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara: (Jangka Menengah)

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Dapat dilihat dari jumlah proposal dan jumlah laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam membuat dan melaksanakan proposal PKM melalui *workshop-workshop*. Diharapkan kuantitas dan kualitas proposal pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.

1. Meningkatkan kapasitas dosen dalam penulisan artikel pengabdian masyarakat melalui *workshop/detasering* PKM. Dapat dilihat semakin banyak artikel dosen yang terpublikasi dalam jurnal. (Jangka Menengah)
2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan program studi dan dosen dan dengan kegiatan Laboratorium Hidup Pancasila di Karang Joang. (Jangka Menengah)

g. Terjalinnya kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan instansi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan profesional Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan dalam mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Kewarganegaraan, Kebhinekaan, dan Transformasi Budaya Nusantara.

1. Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi mitra yang diikuti dengan tindaklanjut program-program kegiatan kerja sama tersebut. (Jangka Panjang)
2. Peningkatan kerja sama dengan sekolah, lembaga atau institusi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan Prodi PPKn dan diikuti dengan program kegiatan nyata. (Jangka Panjang)
3. Menindaklanjuti semua bentuk kerjasama yang ada dengan program kegiatan nyata. (Jangka Panjang)

Catatan: Jangka Pendek dilakukan setiap tahun

Jangka Menengah ketercapaian per 5 tahun

Jangka Panjang ketercapaian per 22 Tahun (Indonesia Emas-Tahun 2045)

F. Profil Lulusan

a. Profil Lulusan

Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah calon pendidik, wirausahawan, ahli hukum di instansi pemerintah, dan peneliti bidang hukum yang memiliki integritas dan profesional.

b. Deskripsi PEO

PEO	Deskripsi
Calon Pendidik	Calon Pendidik di sekolah, lembaga pelatihan, dan institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta di bidang PPKn
Wirausahawan	Wirausahawan yang mampu mengembangkan berbagai unit usaha secara pribadi dan mandiri berbagai jenis usaha selain pekerjaan utama sebagai guru di satuan pendidikan
Ahli Hukum	Ahli hukum yang dapat menjadi narasumber (konsultan) dari berbagai sumber informasi yang diperlukan oleh pimpinan lembaga kemasyarakatan, lembaga politik dan birokrasi
Peneliti	Peneliti yang dapat memimpin dalam penelitian pada lembaga kemasyarakatan, lembaga politik, pemerintahan dan satuan pendidikan

Penyusunan Profil Lulusan Deskripsi PEO

- Jumlah rumusan PEO antara 3 – 5 butir

- Setiap rumusan PEO disusun dalam satu kalimat yang jelas dan dapat diukur serta berorientasi pada kinerja lulusan yaitu (1) dapat melanjutkan studi, (2) dapat bekerja pada lembaga tertentu sesuai keahliannya, dan atau (3) dapat berwirausaha
- Contoh:

c. Indikator PEO

PEO	Indikator
Calon pendidik	Lulusan menjadi guru di bidang PPKn pada satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA dan SMK sederajat Melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi
Wirausahawan	Lulusan menjadi Owner sekolah, bimbingan belajar, Media Pembelajaran
Ahli Hukum	Lulusan menjadi perancang peraturan daerah, Paralegal, konsultan hukum di perusahaan dan Panitera Kewarganegaraan.
Peneliti	Lulusan menjadi peneliti, memimpin dan/atau terlibat dalam proyek penelitian yang relevan di bidang PPKn.

Penyusunan Indikator PEO

Indikator PEO dirumuskan secara operasional dan berorientasi pada outcome (memiliki peran, memiliki kesempatan, menginisiasi, terlibat, menggagas, merintis, dll) di masyarakat/lingkungan pekerjaan. Hindari rumusan Indikator PEO dengan bentuk “output” seperti memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, berwawasan, bersikap, terampil, dan lain-lain.

Contoh rumusan Indikator PEO

- Melanjutkan pendidikan pada program magister bidang pendidikan
- Mendapat kesempatan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari lembaga/organisasi dalam dan luar negeri.
- Berprestasi di lingkungan kerja yang ditunjukkan oleh pengakuan dari rekan sejawat dan atasannya serta mendapat promosi jabatan atau mendapat kejuaraan.
- Dapat mengembangkan lembaga pendidikan di tempat kerjanya sesuai keahlian yang dimilikinya
- Melibatkan diri secara aktif dalam pengembangan profesional pada komunitasnya.
- Diundang sebagai narasumber dalam forum-forum ilmiah tentang pendidikan dan pembelajaran.
- Terlibat dalam penelitian pendidikan dan dapat menerbitkan artikel yang bereputasi nasional dan internasional pada bidang pendidikan dan pembelajaran.
- Dapat mengembangkan berbagai inovasi yang dibutuhkan dalam proses pendidikan sehingga melahirkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- Menjadi tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan pengabdian dan atau pemberdayaan masyarakat.

G. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Jumlah butir 8 – 15

Kode CPL	Deskripsi
CPL 1 S.1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, bertanggungjawab, mandiri serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
CPL 2 S.3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu untuk kemajuan peradaban serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
CPL 3 S.7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
CPL 4 P.1	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewarganegaraan, hukum dan ketatanegaraan dan sosial budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI
CPL 5 P.2	Menguasai konsep teoritis tentang karakteristik peserta didik beserta kontek sosialnya, tahapan perkembangan peserta didik dalam aspek intelektual, personal, spiritual, dan sosial serta mampu menerapkannya dalam mengoptimalkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
CPL 6 P.4	Mengaplikasi pengetahuan tentang bahan ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karakteristik peserta didik, dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
CPL 7 KU.1	Menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovasi dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
CPL 8 KU.3	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan,

	desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifikasi hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi
CPL 9 KK.2	Menerapkan pendekatan, metode dan media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
CPL 10 KK.3	Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
CPL 11 KK.9	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Capaian Pembelajaran Lulusan		Program Education Outcomes (PEO)			
		Calon Pendidik	Kewirausahaan	Ahli Hukum	Peneliti
1.	CPL 1 S.1	✓	✓	✓	✓
2.	CPL 2 S.3	✓		✓	
3	CPL 3 S.7	✓		✓	
4	CPL 4 P.1	✓			
5	CPL 5 P.2	✓	✓	✓	✓
6	CPL 6 P.4	✓	✓	✓	✓
7	CPL 7 KU.1	✓	✓	✓	✓
8	CPL 8 KU.3				✓
9	CPL 9 KK.2	✓			
10	CPL 10 KK.3	✓			
11	CPL 11 KK.9			✓	✓

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Rumusan CPL perlu memperhatikan kebutuhan dunia kerja era Industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang

1. literasi data,
2. literasi teknologi
3. keterampilan abad 21
4. HOTS (*high order thinking skills*)
5. pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
6. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.
7. capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM.

H. Bahan Kajian

Jumlah butir 4 - 10

Kode BK	Deskripsi
BK1 Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Asas-asas, nilai-nilai, dan makna dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.• Hak, kewajiban, tanggung jawab, serta peran individu sebagai warga negara yang baik.• Mengenali identitas, hak, dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan negara.• Melacak sejarah pembentukan dan pengadopsian Pancasila sebagai falsafah negara.• Memahami proses pendidikan formal dan nonformal dalam membentuk kesadaran sebagai warga negara.• Menyelidiki alasan dan urgensi pemilihan Pancasila sebagai panduan utama bagi negara Indonesia.• Partisipasi aktif dalam membangun dan menjaga negara serta masyarakat yang adil dan beradab.• Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.• Peran warga negara dalam berbagai konteks seperti keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat luas.• Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam undang-undang, kebijakan publik, dan tata kelola negara.• Berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
BK2 Ilmu Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Mendeskripsikan ruang lingkup dan materi Ilmu Hukum yang termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan aspek-aspek lain dari hukum.• Menyajikan informasi tentang aktor-aktor di dalam sistem hukum, seperti hakim, pengacara, polisi, dan bagaimana peran mereka mempengaruhi sistem hukum.• Memahami evolusi hukum dari waktu ke waktu, bagaimana hukum telah berkembang, dan perubahan signifikan dalam sistem hukum.• Memahami prinsip-prinsip dasar hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan fungsi hukum

	<p>dalam masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami sistem hukum di dalam negeri dan sistem hukum internasional atau global. • Cara kerja sistem hukum, termasuk proses pengadilan, pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa.
BK3 Nilai Moral	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar, prinsip, dan pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, dan kebenaran. • Kontribusi filsuf-filsuf terkemuka dan sistem pemikiran mereka dalam membentuk cara pandang terhadap dunia. • Evolusi pemikiran filsafat dari masa ke masa, perubahan paradigma, dan kontribusi dalam sejarah pemikiran manusia. • Memahami nilai-nilai, etika, keadilan, dan eksistensi manusia. • Filsafat mempengaruhi dan terlibat dalam struktur sosial, kebijakan publik, dan pemikiran kolektif. • Metode dalam filsafat, seperti deduksi, induksi, analisis konseptual, dan pendekatan eksperimental.
BK4 Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup, teori, konsep, dan metodologi yang terkait dengan politik sebagai bidang studi ilmiah. • Perkembangan politik dari masa ke masa, serta perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika politik. • Prinsip-prinsip dasar politik dan sosiologi, termasuk isu-isu seperti kekuasaan, ketimpangan, konflik, dan integrasi. • Sistem politik lokal, nasional, dan internasional beserta struktur yang mempengaruhinya • Mekanisme politik, pembuatan kebijakan, gerakan politik, interaksi antar individu, dan kelompok dalam masyarakat.
BK5 Sosial dan Humaniora	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman yang kaya tentang manusia, masyarakat, dan dinamika sosial-budaya. • Memberi keterampilan analitis yang kuat, serta pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai,

	<p>perspektif, dan tantangan dalam masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjadi warga yang lebih sadar, pemikir yang kritis, dan pemimpin yang bertanggung jawab dalam konteks sosial dan kemanusiaan.
--	---

Penetapan Bahan Kajian

Definisi operasional tentang Bahan Kajian adalah *body of knowledge* disiplin ilmu.

Jumlah butir 4 - 10

I. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks

No	Bahan Kajian	Nama Matakuliah
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Pancasila 2. Pendidikan Politik 3. Pembelajaran Berbasis Multimedia 4. Penelitian Pendidikan 5. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6. Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila 7. Pendidikan Kewarganegaraan 8. Pengantar Ilmu Pendidikan 9. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 10. Seminar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 11. Skripsi
2	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Pengantar Ilmu Hukum 3. Filsafat Hukum 4. Hukum Islam 5. Hukum Tata Negara 6. Hukum Acara Perdata dan Pidana, 7. Hukum dan Hubungan Internasional 8. Hukum Adat 9. Hukum Agraria 10. Hukum Perdata 11. Hukum Pidana 12. Hukum Administrasi Negara
3	Nilai Moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filsafat Ilmu 2. Pendidikan Karakter dan Moral Pancasila

		3. Pendidikan Anti Korupsi 4. Filsafat Moral 5. Filsafat Pancasila 6. Logika 7. Hak Asasi Manusia 8. Gender
4	Politik	1. Sosiologi Politik 2. Demokrasi Pancasila 3. Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia 4. Politik Hukum 5. Ilmu Negara 6. Teori Konstitusi 7. Ilmu Pemerintahan 8. Ilmu Politik
5	Sosial dan Humaniora	1. Kuliah Kerja Nyata, 2. Kepemimpinan 3. Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 4. Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 5. Sosiologi 6. Studi Masyarakat Indonesia 7. Antropologi Budaya 8. Kewirausahaan 9. Ekonomi Pancasila 10. Mitigasi Bencana

No	Nama Matakuliah	CPL										
		CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10	CPL 11
1.	Pendidikan Anti Korupsi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Pendidikan Pancasila	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Pendidikan Politik	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Pembelajaran Berbasis Multimedia	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓
5.	Penelitian Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Perencanaan	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓

	Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan											
7.	Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila	✓		✓		✓	✓				✓	✓
8.	Pendidikan Kewarganegaraan	✓	✓	✓	✓						✓	✓
9.	Pengantar Ilmu Pendidikan	✓		✓								✓
10.	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	✓		✓		✓	✓				✓	✓
11.	Seminar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓
12.	Skripsi	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Pengantar Hukum Indonesia	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
14.	Pengantar Ilmu Hukum	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
15.	Filsafat Hukum	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
16.	Hukum Islam	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓
17.	Hukum Tata Negara	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
18.	Hukum Acara Perdata dan Pidana	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
19.	Hukum dan Hubungan Internasional	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
20.	Hukum Adat	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
21.	Hukum Agraria	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
22.	Hukum Perdata	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
23.	Hukum Pidana	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
24.	Hukum Administrasi	✓		✓	✓			✓				✓

	Negara											
25.	Filsafat Ilmu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26.	Pendidikan Karakter dan Moral Pancasila	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
27.	Filsafat Moral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.	Filsafat Pancasila	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29.	Logika	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30.	Sosiologi Politik	✓		✓	✓							✓
31.	Demokrasi Pancasila	✓		✓	✓							✓
32.	Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia	✓		✓								✓
33.	Politik Hukum	✓		✓	✓							✓
34.	Ilmu Negara	✓		✓								✓
35.	Teori Konstitusi	✓		✓								✓
36.	Ilmu Pemerintahan	✓		✓								✓
37.	Ilmu Politik	✓		✓	✓							✓
38.	Hak Asasi Manusia	✓	✓	✓		✓		✓				✓
39.	Gender	✓		✓		✓		✓				✓
40.	Kuliah Kerja Nyata	✓		✓		✓		✓	✓			✓
41.	Kepemimpinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42.	Pengenalan Lapangan Persekolahan 1	✓		✓		✓	✓	✓				✓
43.	Pengenalan Lapangan Persekolahan 2	✓		✓		✓	✓	✓				✓
44.	Sosiologi	✓	✓	✓								✓
45.	Studi Masyarakat Indonesia	✓	✓	✓				✓				✓
46.	Antropologi Budaya	✓	✓	✓					✓			✓
47.	Kewirausahaan	✓		✓				✓				✓
48.	Ekonomi Pancasila	✓		✓								✓
49.	Pengelolaan Mitigasi dan Adaptasi Bencana	✓		✓				✓				✓

Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks

Bagian inti, program studi melakukan dua tahap kegiatan yaitu:

1. Pengelompokan mata kuliah pada Bahan Kajian. Jika sejumlah bahan kajian tidak terakomodasi pada matakuliah yang sedang berjalan, maka prodi dapat menambah nama matakuliah yang baru, tetapi tidak boleh menghapus nama matakuliah yang sedang berlaku.
2. Pembuatan matrik keterkaitan Mata Kuliah dengan CPL

J. Matriks dan Peta Kurikulum (Struktur Kurikulum)

Kode Mata Kuliah Semester Ganjil dan Genap

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	190505603W0006	Filsafat Ilmu	3
2	MU0000602W005	Ilmu Alamiah Dasar	2
3.	MU0000602W003	Pendidikan Kewarganegaraan	2
4.	MU0000603W001	Agama	3
5.	190505602W0007	Pengantar Hukum Indonesia	2
6.	190505603W0008	Pengantar Ilmu Hukum	3
7.	MU0000602W004	Pendidikan Bahasa Indonesia	2
8.	190505603W0003	Dasar dan Konsep Pendidikan Moral	3
9.	190505602W0002	Belajar Pembelajaran	2
10.	190505602W0001	Bahasa Inggris	2
11.	190505602P0004	Etika Komunikasi	2
12.	190505602W0005	Ilmu Kewarganegaraan	2
13.	MU0000602W002	Pendidikan Pancasila	1

14.	190505603W0024	Sosiologi	3
15.	190505603W0023	Pendidikan Politik	3
16.	190505602W0022	Nasionalisme Indonesia	2
17.	190505602W0017	Filsafat Hukum	2
18.	190505602W0026	Wawasan Ilmu Sosial	2
19.	190505602W0025	Studi Masyarakat Indonesia	2
20.	190505603W0019	Hukum Tata Negara	3
21.	190505602W0020	Ilmu Pemerintahan	2
22.	190505603W0021	Ilmu Politik	3
23.	190505602W0018	Hukum Islam	2
24.	190505603W0040	Metodologi Penelitian Pendidikan	5
25.	190505602W0041	Pendidikan Karakter dan Moral Pancasila	5
26.	190505602P0037	Gender dan Pendidikan	5
27.	190505602W0039	Hukum dan Hubungan Internasional	5
28.	190505603W0044	Strategi dan Media Pembelajaran PPKn	5
29.	190505603W0036	Antropologi Budaya	5
30.	190505603W0043	Sosiologi Politik	5
31.	190505603W0042	Perencanaan Pembelajaran PKn	5
32.	190505603W0038	Hukum Acara Perdata dan Pidana	5
33.	MU000603W008	Kuliah Kerja Nyata	3

34.	190505601W0053	Pengenalan Lapangan Persekolahan 1	1
35.	190505603W0056	Pengenalan Lapangan Persekolahan 2	3

Kode Mata Kuliah Semester Genap

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	190505602W0015	Pengantar Ilmu Pendidikan	2
2.	190505602W0011	Hukum Adat	2
3.	190505602P0009	Etika Profesi	2
4.	190505602W0010	Filsafat Moral	2
5.	190505602W0012	Ilmu Negara	2
6.	190505602P0016	Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan	2
7.	190505602W0013	Keterampilan Dasar Mengajar	2
8.	190505602P0014	Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial	2
9.	190505603W0034	Statistik	3
10	190505602W0029	Hukum Agraria	2
11	190505602W0028	Filsafat Pancasila	2
12	190505602W0027	Demokrasi Pancasila	2
13	190505604W0032	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar PKn	4
14	190505603W0031	Hukum Pidana	3
15	190505603W0033	Sistem Politik dan	3

		Pemerintahan Indonesia	
16	190505602W0030	Hukum Perdata	2
17	190505603W0035	Teori Konstitusi dan UUD 1945	3
18	190505602W0047	Evaluasi Pembelajaran PKN	2
19	190505601W0054	Seminar PPKn	1
20	190505602P0045	Bisnis dan Kewirausahaan	2
21	190505602W0048	Hak Asasi Manusia	2
22	190505602W0046	Ekonomi Pancasila	2
23	19050564W0053	Praktik Pengalaman Lapangan I	4
24	190505602W0051	Logika	2
25	190505603W0050	Hukum Politik	3
26	190505602P0052	Pendidikan Anti Korupsi	2
27	190505602W0049	Hukum Administrasi Negara	2
28	190505602P0055	Mitigasi Bencana	2
29	190505606W0057	Skripsi	6

1. Matrik Kurikulum yang mengakomodasi Program MBKM

Semester	Jumlah sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI												PROGRAM MB-KM *)		
														Dalam PT	PT Lain	Non-PT
1	2	3												4	5	
VI II	6	19 05 05														Contoh: Kode MK (20 sks)

		60 6 W 00 57														
		6 Sks											6 Sks			
VI I	6	MU0 0006 03W 0007	1905 0560 1W0 053	1905 0560 3W0 056												Contoh: Kode MK (20 sks)
		3 Sks	1 Sks	3 Sks									6 Sks			
VI	24	1905 0560 2P00 45	1905 0560 2W0 046	1905 0560 2W0 047	190 505 602 W0 048	190 505 602 W0 049	1905 0560 3W0 050	1905 0560 2W0 051	190 505 602 P00 52	190 505 604 W0 053	190 505 601 W0 054	190 505 602 P0 055	Kode MK		Cont oh: Kode MK (20 sks)	
		2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	4 Sks	2 Sks	2 Sks	24 Sks			
V	24	1905 0560 3W0 036	1905 0560 2P00 37	1905 0560 3W0 038	190 505 602 W0 039	190 505 603 W0 040	1905 0560 2W0 0 41	1905 0560 3W0 0 42	190 505 603 W00 43	190 505 603 W0 0 44			Kode MK	Co nto h: Kod e MK (20 sks)		
		3 Sks	2 Sks	3 Sks	2 Sks	3 Sks	2 Sks	3 Sks	3 Sks	3 Sks			24 Sks			
IV	24	1905 0560 3W0 0 34	1905 0560 2W0 0 29	1905 0560 2W0 0 28	190 505 604 W0 0 32	190 505 603 W0 0 31	1905 0560 3W0 0 33	1905 0560 2W0 0 30	190 505 603 W00 35					TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI PERKULIAHAN UPI ATAU MENGIK		
		3 Sks	2 Sks	2 Sks	4 Sks	3 Sks	3 Sks	2 Sks	3 Sks				24 Sks			
III	24	1905 0560 3W0 0 24	1905 0560 3W0 0 23	1905 0560 2W0 0 22	190 505 602 W0 0 17	190 505 602 W0 0 26	1905 0560 2W0 0 25	1905 0560 3W0 0 19	190 505 602 W00 20	190 505 603 W0 0 21	190 505 602 W0 0 18					
		3 Sks	3 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	3 Sks	2 Sks	3 Sks	2 Sks		24 Sks			
II	24	1905 0560 2W0 0 15	1905 0560 2W0 0 11	1905 0560 2P0 009	190 505 602 W1 600 10	190 505 602 W0 0 12	1905 0560 2P00 16	MU0 0006 03W 0013	190 505 602 P00 14	MU 019 050 560 2W 00 05	MU 000 005 602 W0 0 03	M U0 000 056 03 W0 0	Kode MK			

												01		
		2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	3 Sks	24 Sks	
I	23	1905 0560 3W0 006	1905 0560 2W0 007	1905 0560 3W0 008	190 505 602 W0 004	190 505 603 W0 003	1905 0560 2W0 002	1905 0560 2W0 001	MU 000 060 2W0 002	190 505 602 P00 04	190 505 602 W0 005			
		3 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	3 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks	2 Sks		23 Sks	
						5								

Keterangan: *) Khusus untuk Program Sarjana

K. Matriks dan Peta Kurikulum (Struktur Kurikulum)

Pemetaan MK per semester dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Semester I							
1	MU000 0602W 0004	W	Bahasa Indonesia	Indonesia Language	1	2	MK Universitas
2	190505 602W0 001	W	Bahasa Inggris	English	1	2	MK PS-PPKn
3	190505 602W0 002	W	Belajar Pembelajaran	Learn and Learning	1	2	MK Fakultas
4	190505 603W0 003	W	Dasar dan Konsep Pendidikan Moral	Basis and Concept of Moral Education	1	3	MK PS-PPKn

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
5	190505602P0004	P	Etika Komunikasi	Communication Ethics	1	2	MK PS-PPKn
6	190505602W0005	W	Ilmu Kewarganegaraan	Science philosophy	1	2	MK PS-PPKn
7	MU0000602W0002	W	Pancasila/	Citizenship Science	1	2	MK Universitas
8	190505603W0006	W	Filsafat Ilmu	Pancasila Education	1	3	MK PS-PPKn
9	190505602W0007	W	Pengantar Hukum Indonesia	Introduction to Indonesian Law	1	2	MK PS-PPKn
10	190505603W0008	W	Pengantar Ilmu Hukum	Introduction to Law	1	3	MK PS-PPKn
					Jumlah 23 Sks		
Semster II							
11	190505602P0009	P	Etika Profesi	Professional Ethics	2	2	MK PS-PPKn
12	190505602W0010	W	Filsafat Moral	Moral Philosophy	2	2	MK PS-PPKn
13	190505602W0011	W	Hukum Adat	Common Law	2	2	MK PS-PPKn
14	190505602W0	W	Ilmu Negara	State Science	2	2	MK PS-PPK

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
	012						n
15	190505602W0013	W	Keterampilan Dasar Mengajar	Basic Teaching Skills	2	2	MK PS-PPKn
16	MU0000603W0001	W	Agama	Religion	2	3	MK Universitas
171	MU0000602W0005		Ilmu Alamiah Dasar	Basic Natural Science	2	2	MK Universitas
18	MU0000602W0003	W	Pendidikan Kewarganegaraan	Civics	2	3	MK Universitas
19	190505602P0014	P	Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial	Introduction to Social Sciences	2	2	MK PS-PPKn
20	190505602W0015	W	Pengantar Ilmu Pendidikan	Introduction to Education	2	2	MK Fakultas
					Jumlah 22 Sks		
Semester III							
21	190505602W0017	W	Filsafat Hukum	Philosophy of Law	3	2	MK PS-PPKn
22	190505602W0018	W	Hukum Islam	Islamic Law	3	2	MK PS-PPKn
23	190505	W	Hukum	Constit	3	3	MK

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
	603W0019		Tata Negara	utional Law			PS-PPKn
24	190505602W0020	W	Ilmu Pemerintahan	Govern ment Science	3	2	MK PS-PPKn
25	190505603W0021	W	Ilmu Politik	Political science	3	3	MK PS-PPKn
26	190505602W0022	W	Nasiona lisme Indones ia	Indones ian national ism	3	2	MK PS-PPKn
27	190505603W0023	W	Pendidi kan Politik	Political Educati on	3	3	MK PS-PPKn
28	190505603W0024	W	Sosiolo gi	Sociolo gy	3	3	MK PS-PPKn
29	190505602W0025	W	Studi Masyar akat Indones ia	Indones ian Commu nity Study	3	2	MK PS-PPKn
30	190505602W0026	W	Wawasa n Ilmu Sosial	Social Science s Insights	3	2	MK PS-PPKn
					Jumlah 24 Sks		
Semester IV							
31	190505602W0027	W	Demokr asi Pancasila	Pancasil a Democr acy	4	2	MK PS-PPKn
32	190505602W0	W	Filsafat Pancasila	Pancasil a	4	2	MK PS-PPK

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
	028		a	Philosophy			n
33	190505602W0029	W	Hukum Agraria	Agrarian Law	4	2	MK PS-PPKn
34	190505602W0030	W	Hukum Perdata	Civil Law	4	2	MK PS-PPKn
35	190505603W0031	W	Hukum Pidana	Criminal Law	4	3	MK PS-PPKn
36	190505604W0032	W	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar PPKn	Development of Curriculum and Teaching Materials PPKn	4	4	MK PS-PPKn
37	190505603W0033	W	Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia	Indonesian Political and Government System	4	3	MK PS-PPKn
38	190505603W0034	W	Statistik	Statistics	4	3	MK PS-PPKn
39	190505603W0035	W	Teori Konstitusi dan UUD 1945	Theory of the Constitution and the 1945 Constitution	4	3	MK PS-PPKn

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
					Jumlah 24 Sks		
Semester V							
40	190505603W0036	W	Antropologi Budaya	Cultural Anthropology	5	3	MK PS-PPKn
41	190505602P0037	P	Gender dan Pendidikan	Gender and Education	5	2	MK PS-PPKn
42	190505603W0038	W	Hukum Acara Perdata dan Pidana	Civil and Criminal Procedure Law	5	3	MK PS-PPKn
43	190505602W0039	W	Hukum dan Hubungan Internasional	Law and International Relations	5	2	MK PS-PPKn
44	190505603W0040	W	Metodologi Penelitian Pendidikan	Educational Research Methodology	5	3	MK PS-PPKn
45	190505602W0041	W	Pendidikan Karakter dan Moral Pancasila	Character Education and Pancasila Morals	5	2	MK PS-PPKn
46	190505603W0042	W	Perencanaan Pembelajaran	PPKn Learning Plannin	5	3	MK PS-PPKn

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
			PKn	g			
47	190505603W0043	W	Sosiologi Politik	Political Sociology	5	3	MK PS-PPKn
48	190505603W0044	W	Strategi dan Media Pembelajaran PPKn	Strategy and Learning Media of PPKn	5	3	MK PS-PPKn
					Jumlah 24 Sks		
Semester VI							
49	190505602P0045	P	Bisnis dan Kewirausahaan	Business and Entrepreneurship	6	2	MK PS-PPKn
50	190505602W0046	W	Ekonomi Pancasila	Pancasila Economics	6	2	MK PS-PPKn
51	190505602W0047	W	Evaluasi Pembelajaran PPKn	Evaluation of Civics Learning	6	2	MK PS-PPKn
52	190505602W0048	W	Hak Asasi Manusia	Human Rights	6	2	MK PS-PPKn
53	190505602W0049	W	Hukum Administrasi Negara	State Administrative Law	6	2	MK PS-PPKn
54	190505603W0	W	Hukum Politik	Political Law	6	3	MK PS-PPK

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
	050						n
55	190505602W0051	W	Logika	Logic	6	2	MK PS-PPKn
56	190505602P0052	P	Pendidikan Anti Korupsi	Education Against Corruption	6	2	MK PS-PPKn
57	190505601W0054	W	Seminar PPKn	PPKn Seminar	6	1	MK PS-PPKn
58	190505602P0055	P	Mitigasi Bencana	Disaster Mitigation	6	6	MK PS-PPKn
					Jumlah 24 Sks		
Semester VII							
59	MU0000603W0007	W	Kuliah Kerja Nyata/Community Service Program	Community Service Program	7	3	MK Universitas
60	190505601W0053	W	Pengenalan Lapangan Persekolahan 1	Practice Field Experience 1	7	1	MK Fakultas
61	190505603W0056	W	Pengenalan Lapangan Persekolahan 2	Practice Field Experience 2	7	3	MK Fakultas

No	Kode Mata kuliah	Tipe	Mata Kuliah	Course	Semester	SKS	Keterangan
					Jumlah 7 Sks		
Semester VIII							
62	190505 606W0 057	W	Skripsi	Final Project (Essay)	8	6	MK PS-PPKn
					Jumlah 6 Sks		

L. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi

Ps-PPKn mendesain Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk:

- 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama pada semester III,
- 2). Belajar di Prodi yang sama di luar PT pada Semester III,
- 3). Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT dilaksanakan pada Semester V , dan
- 4). Belajar di luar PT dilaksanakan di Semester V.

M. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Pada bagian ini, program studi menyusun suatu mekanisme implementasi kurikulum yang meliputi proses Pembelajaran, Proses Pembimbingan program MBKM, Proses Penilaian Proses dan Kriteria Penilaian, dan Proses Penentuan Ketuntasan Belajar.

Mekanisme:

(1) Program Studi: Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain; Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studinya; Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain; Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa: Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Mengikuti program dan kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

(3) Penilaian: Penilaian terhadap keberhasilan peserta diserahkan kepada kebijakan akademik program studi atau perguruan tinggi tujuan. Penilaian akademik disampaikan dalam bentuk angka kuantitatif dan kualitatif agar memudahkan proses pengakuan nilai di perguruan tinggi asal. Penilaian terhadap keberhasilan kegiatan dilakukan terhadap setiap akhir semester. Penilaian terhadap kegiatan harus mencakup dampak kegiatan terhadap perkembangan aspek kognitif, intrapersonal,

dan interpersonal peserta. Penilaian terhadap kegiatan harus mencakup dampak kegiatan terhadap mutu tridharma dan tata kelola perguruan tinggi asal dan tujuan.

N. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Program studi PPKn telah mendokumentasikan RPS kunjungi Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1EOYaAiz7HXnpdCL6kz2mmpqqBuUlfQpd?usp=sharing> yang disusun dan dilampirkan secara terpisah dari dokumen kurikulum namun menjadi satu kesatuan dari keseluruhan dokumen kurikulum program studi.

O. Evaluasi Kurikulum Program Studi

Evaluasi kurikulum wajib dilakukan bagi setiap Prodi sebagai kegiatan yang menyeluruh dan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; serta mempengaruhi pengembangan komponen penting dalam kurikulum, yaitu komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum meliputi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, teoritis, dan yuridis. Pengembangan kurikulum mengikuti siklus pengembangan kurikulum yang selaras dengan kebijakan di Perguruan Tinggi masing-masing, sehingga lulusan setiap Perguruan Tinggi dapat memiliki keunggulan dan penciiri yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya. PS-PPKn melakukan Evaluasi Kurikulum sekali dalam 3 tahun dengan melibatkan Pakar Kurikulum Nasional diantaranya ada yang dari Asosiasi profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KNI). LP3M Universitas Mulawarman, Penjaminan Mutu Fakultas dan beberapa dosen hadir dalam rapat evaluasi pengembangan kurikulum PS-PPKn yang dilaksanakan di Hotel Aston Jl. P. Hidayatullah Samarinda kalimantan Timur,



